

KLAIM INGGRIS ATAS WILAYAH SEMENANJUNG ANTARTIKA

Dwi Hermawan¹
Nim. 1302045099

Abstract

The aim of this research is to find out why the UK made claims against the territory of the Antarctic Peninsula. This is a descriptive research which is analyzed by theory Geopolitic, using descriptive research type. The data presented in this research is a secondary data. The results of this study indicate that there are at least two British interests in making their claims on the territory of the Antarctic Peninsula. These are interest is control of the territory as evidenced by the naming of some of the territories included in the claim and the determination of the territory claimed as a British overseas, as well as some efforts which one of them promotes that the region is British sovereignty in Antarctica. The second interest is the mastery of the existence of resources as evidenced by the presence of fisheries potential, tourism potential, and the prediction of natural resources in the region.

Keywords: *Claim, Antarctic Peninsula, Geopolitict.*

Pendahuluan

Di abad ke-21, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi semakin meningkat jumlahnya, dilihat dari bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak di dunia semakin bertambah dengan pesat setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan beberapa negara meneliti wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yaitu salah satunya berada di Kutub Selatan atau pada Benua Antartika. Benua Antartika merupakan daratan yang sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh es, terletak di Kutub Selatan bumi dan memiliki luas wilayah sekitar 14.000.000 km², benua ini terbagi menjadi tiga bagian area utama yaitu Antartika Timur, Antartika Barat, dan Semenanjung Antartika (CIA. 2016)

Semenanjung Antartika adalah geografis Antartika yang sebagian dari wilayahnya memanjang keluar Lingkaran Antartika (*Antarctic Circle*). Perpanjangan melengkung benua ini meluas hampir 250 mil ke utara *Antarctic Circle* dan mengarah ke ujung selatan Amerika Selatan. Semenanjung Antartika memiliki sejumlah gletser dan es terapung yang berubah dengan cepat karena daerah ini lebih cepat memanas dari pada bagian benua lainnya.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dwihermawan@asia.com

Menurut CIA, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup beragam seperti; bijih besi, kromium, tembaga, emas, nikel, batubara, hidrokarbon, dan mineral lainnya; tidak ada yang dieksploitasi. Sedangkan sumber daya lain seperti krill (sejenis udang), *finfish* (ikan), dan kepiting telah diambil oleh perikanan komersial. Begitupun menurut Greepeace, menganggap ada bukti kuat bahwa di bawah batu dan es Antartika terdapat minyak dan juga mineral (<http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/Victories-timeline/Antarctic-Treaty/>).

Sejak awal abad ke-20 wilayah ini mulai diklaim kepemilikannya oleh Inggris, Argentina, Chili, Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan Prancis. Di antara negara-negara yang melakukan klaim wilayah tersebut, tiga negara yaitu; Inggris, Argentina, dan Chili membuat klaimnya di wilayah yang sama yaitu pada Semenanjung Antartika sehingga terjadi tumpang tindih klaim, juga menyebabkan konflik antara tiga negara tersebut. Argentina dan Chili mendasarkan klaimnya atas kedekatan geografis untuk membenarkan konsep "*South American Antarctic*" yang mencakup kuardan Antartika di bawah Amerika Selatan. Konsep ini sebagai mana yang tercantum dalam Traktat Rio tahun 1947 dan ditegaskan kembali oleh Deklarasi Donoso-La Rosa 1948, berpendapat bahwa negara-negara yang bertetangga dengan sektor Antartika, memiliki hak kedaulatan istimewa atas mereka.

Hingga pada pertengahan tahun 1950-an pemerintah Inggris berusaha untuk mengajukan sengketa kedaulatan Antartika ke Pengadilan Internasional. Dalam hal ini, baik Argentina maupun Chili tidak mendukung penerapannya, sehingga tidak hanya menggagalkan langkah menuju penyelesaian perselisihan, namun juga merampas kesempatan Inggris untuk mendapatkan panduan hukum otoritatif mengenai masalah kedaulatan Antartika.

Setelah Perang Dunia II atau pada pertengahan abad ke-20, benua Antartika menjadi tempat destinasi para peneliti, dimana intensitasnya sangat tinggi. Untuk membentuk kerangka hukum kegiatan negara-negara di benua ini, sebuah Perjanjian Antartika dibuat atas inisiasi Amerika Serikat. Perjanjian Antartika yang diinisiasikan oleh Amerika Serikat, akhirnya ditandatangani oleh dua belas negara yaitu Argentina, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Inggris, Amerika, dan Rusia pada tanggal 1 Desember 1959 di Washington dan perjanjian ini mulai berlaku sejak 1961. Perjanjian ini memberikan aturan bagi negara-negara untuk melakukan aktivitasnya di Antartika, memperuntukkan wilayah Antartika digunakan dengan tujuan damai serta perjanjian ini menetapkan sektor Antartika memiliki status quo yang terdapat pada pasal IV.

Meskipun telah ditetapkan status quo serta hanya memperbolehkan wilayah Antartika digunakan dengan tujuan damai, namun pada tahun 2007 Inggris justru melakukan klaim ulang dengan memberi penegasan kalim, yang memicu timbulnya pertentangan atas Argentina dan Chili yang mana kedua negara ini juga memiliki sejarah klaimnya pada wilayah yang juga diklaim oleh Inggris.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Geopolitik

Istilah Geopolitik dipopulerkan oleh tulisan Karl Haushofer. Pada tahun 1928, Haushofer dan editor *Journal of Geopolitics* lainnya. Uraian mereka mengenai definisi Geopolitik:

“Geopolitik adalah ilmu pengkondisian proses politik oleh bumi, didasarkan pada landasan yang luas tentang teori, terutama geografi politik, sebagai ilmu tentang organisme ruang politik dan strukturnya. Inti wilayah yang dipahami dari sudut pandang geografis menyediakan kerangka kerja bagi geopolitik di mana jalannya proses politik harus dilanjutkan jika ingin berhasil dalam jangka panjang meskipun para pemimpin politik kadang-kadang sampai di luar kerangka ini, ketergantungan bumi pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang menentukan. Dengan demikian, geopolitik bertujuan untuk menjadi peralatan untuk tindakan politik dan pedoman dalam kehidupan politik. Geopolitik harus menjadi naluri geografis negara.”

Geopolitik didefinisikan sebagai hubungan antara politik kekuasaan dan geografi. Dengan kata lain, perencana diplomatik dan militer perlu mengingat faktor geografis sementara membuat strategi dan kebijakan, yang dapat menghambat atau meningkatkan tindakan mereka di arena dunia.

Pemikir geopolitik telah mempresentasikan serangkaian visi global tentang hubungan kekuatan internasional dan bagaimana geografi mempengaruhi mereka. Perspektif utama geopolitik adalah: Perspektif geopolitik maritim; perspektif geopolitik kontinental; perspektif geopolitik *Aerospace*, dan perspektif geopolitik Sumber Daya (http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18345/9/09_chapter%202.pdf).

1. Perspektif geopolitik Maritim: Perspektif geopolitik ini percaya bahwa pengendalian lautan adalah cara terbaik untuk memproyeksikan kekuatan dan kunci untuk menjadi kekuatan dunia. Untuk mendirikan sebuah kekuatan laut, sebuah negara harus mengendalikan jalur laut dan pangkalan di kepulauan-kepulauan penting dan strategis. Dengan demikian, negara dapat mengendalikan perdagangan, transportasi dan asset militer.
2. Perspektif geopolitik Continental: Perspektif ini memandang tentara dan kontrol tanah sebagai faktor strategis utama untuk menciptakan dominasi dunia. Angkatan laut dan angkatan udara melayani terutama untuk mengangkut dan mendukung tentara di lapangan, dan ini dipandang sebagai instrumen utama untuk memproyeksikan kekuasaan dan kehendak nasional.
3. Perspektif geopolitik *Aerospace*: Perspektif kedirgantaraan merupakan hasil kemajuan teknologi di bidang peperangan. Sudah jelas dari peran pesawat tempur yang lebih ketat dalam Perang Dunia I. Penemuan pembom strategis dan rudal balistik antar benua (ICBM), yang mampu membawa hulu ledak nuklir, telah memaksa pemikir geopolitik untuk mengakui peran kekuatan mereka dalam strategi perang dan kemudian di geopolitik.
4. Perspektif geopolitik sumber daya: Perspektif geopolitik sumber daya adalah pandangan dunia yang relatif baru. Ini mendapat dorongan terbesarnya dengan Krisis Minyak pada tahun 1973. Perspektif ini berpusat terutama pada kompetisi sumber daya minyak langka dan sumber energi lainnya serta mineral strategis.

Sementara pandangan Kjellen, konsep geopolitik bahwa negara sebagai satuan biologis (organisme) dapat mencapai tujuannya hanya dengan perluasan ruang untuk memungkinkan perkembangan bebas dari potensi rakyatnya. Kjellen menambahkan pendapatnya bahwa dalam pencapaian kebutuhan setiap negara tidak perlu bergantung kepada pembekalan luar, suatu bangsa harus memiliki swasembada melalui sebuah peningkatan kekuatan nasionalnya melalui beberapa cara seperti; a) ke dalam, membentuk suatu persatuan dan kesatuan yang harmonis, b) ke luar, memekarkan wilayahnya agar mendapatkan batas-batas yang menguntungkan.

Kjellen sangat terkesan dengan implikasi gagasan politico-geografis Ratzel yang menganggapnya sebagai organisme dalam arti bahwa:

“Negara bukan hanya sebagai makhluk hidup tapi juga sebagai makhluk sadar yang dilengkapi dengan kapasitas moral dan intelektual. Dia setuju dengan Ratzel bahwa tujuan akhir pembangunan negara adalah pencapaian kekuasaan. Namun, Kjellen berpendapat bahwa dalam usaha mencari kekuasaan, negara tidak perlu mengikuti hukum organik sederhana mengenai perluasan wilayah. Sebaliknya, ia mungkin menggunakan kemajuan dan teknik budaya modern dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.” (Ramesh Dutta Dikshit 1982).

Kjellen mendefinisikan geopolitik, sebuah istilah yang telah ia ciptakan sendiri, sebagai teori negara sebagai organisme geografis, yaitu, sebagai tanah, wilayah, daerah, atau yang paling khusus, sebagai sebuah negara. Dia menganggap negara-negara tidak begitu banyak badan hukum sebagai kekuatan bersaing yang terlibat dalam perjuangan tanpa henti untuk supremasi. Bagi Kjellen, tujuan akhir pembangunan politik negara adalah untuk memperoleh batas alam yang baik secara eksternal dan harmonis secara internal.

Kjellen menurunkan moralitas dan aturan hukum, dan malah memberi penekanan pada kontes kekuatan. Baginya kesimpulan logis dari kontes ini untuk kekuasaan adalah munculnya sejumlah kecil negara yang sangat besar dan kuat. Kjellen berpendapat bahwa perang, perluasan, dan pelanggaran hukum internasional bukan karena beberapa kekuatan fatalistik dan deterministik yang beroperasi di luar wilayah manusia tetapi karena kemauan dan dorongan manusia, bangsa dan pemimpin mereka.

Kjellen sangat tertarik pada studi tentang proses dimana wilayah-wilayah tersebut ditransformasikan dari wilayah geografis sederhana menjadi wilayah politik budaya, masing-masing memiliki kepribadian dan naluri yang berbeda untuk kelangsungan hidup, pelestarian diri dan propagasi (atau perluasan). Proses pendudukan manusia di suatu wilayah memberikannya, dalam urutan kausal, kontinuitas, solidaritas, interaksi, kesetiaan, dan kewarganegaraan; Itulah ciptaan sebuah bangsa dengan apa yang disebut Kjellen sebagai naluri geografis.

Sementara menurut Ralf Emmers, geopolitik menekankan bahwa geografi sangatlah penting untuk memahami pola perilaku negara dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Asumsi-asumsi utama dalam geopolitik yang dirangkum menjadi tiga komponen utama yaitu wilayah, sumber daya alam (energi) dan power (kekuatan). Secara lebih lanjut, ketiga komponen geopolitik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Wilayah

Wilayah berkaitan dengan pemerintahan (statehood), batas-batas nasional, klaim teritorial dan nasionalisme. Wilayah memberikan keuntungan strategis dan ekonomis bagi sebuah negara karena dapat meningkatkan posisi politik sebuah negara dalam sistem internasional. Sesuai dengan pandangan kaum realis, wilayah dipandang sebagai sebuah “penanda” bagi posisi sebuah negara di dunia dan dapat menjadi sumber ketegangan. Oleh karena itu, batas-batas wilayah dan demarkasi fisik merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara karena tidak dapat dipisahkan dari argumen politik untuk memperoleh dan mempertahankan kedaulatannya.

b) Energi (Sumber daya alam)

Kebutuhan akan sumber daya alam dan energi telah mempengaruhi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Cadangan energi sebuah negara yang mencukupi merupakan satu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi penduduknya, menjamin standar hidup dan membantu pembangunan bagi negara. Sumber daya alam seringkali berubah dari masalah low politics yang hanya berkaitan dengan produksi dan konsumsi secara domestik menjadi masalah high politics yang berkaitan dengan keamanan nasional. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi kekuatan ekonomi dan posisi politik suatu negara terhadap negara lain, sementara kelangkaan sumber daya alam akan menyebabkan sebuah negara menjadi rentan dan bergantung terhadap negara lain.

c) Power

Power dalam hal ini dikaitkan dengan tradisi realis yang menekankan pada kekuatan secara militer. Hal ini sejalan dengan pandangan Morgenthau bahwa politik internasional sama seperti politik adalah struggle for power dan apapun tujuan dari politik internasional, power selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Morgenthau menjelaskan pula bahwa political power adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan tindakan seseorang dengan cara mempengaruhi pikiran orang tersebut. Selain itu, Joseph Nye menjelaskan bahwa negara dapat menunjukkan power melalui metode kultural, ideologi, dan linguistik sehingga power merupakan penjumlahan dari berbagai kapabilitas seperti jumlah penduduk, letak geografis, dan kekuatan militer, ekonomi, politik dan ideologis maupun komponen kultural (Ralf Emmers 2009).

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang alasan Inggris melakukan klaimnya terhadap wilayah Semenanjung Antartika, Serta teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*), dimana penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, baik buku, literature, serta referensi-referensi lain yang kiranya dapat mendukung penulisan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif dengan metode konten analisis, yaitu analisis isi yang bersumber dari berita, media cetak, internet, dan lainnya.

Hasil Penelitian

Semenanjung Antartika (Antarctic Peninsula)

Antartika merupakan kontinen yang berada di Kutub Selatan Bumi, dengan luas wilayah sekitar 14 juta km². Wilayah ini memiliki iklim yang sangat dingin. Suhu saat musim dingin di pesisir Antartika umumnya berkisar antara -10°C hingga -30°C, sedangkan saat musim panasnya berkisar sekitar 0°C hingga 15°. Namun pada daerah pegunungan di musim dingin, suhunya bisa berada dibawah -60°C. Meskipun wilayah ini memiliki luas yang lebih besar dibandingkan Benua Australia serta memiliki iklim yang cukup hangat di beberapa daerahnya, tetapi hingga saat ini tidak ditemukan penduduk asli yang mendiami benua ini, walaupun demikian, pada wilayah ini terdapat biota air seperti ikan paus bungkuk, toothfish, krill, dan pantagonal juga biota darat seperti Anjing Laut (*Leopard Seal*), burung Skua dan populasi besar pinguin, dan salah satu populasi besar pinguin di benua ini yaitu populasi pinguin Adélie yang terdapat di sebelah Barat Antartika, tepatnya pada wilayah Semenanjung Antartika (Agus Supangat 2011).

Wilayah Semenanjung Antartika merupakan bagian dari wilayah Antartika yang mencakupi sekitar 7% dari total luas benua tersebut. Secara geografis wilayah ini memiliki iklim lebih hangat dibandingkan dengan wilayah Timur Antartika, sedangkan biota yang berada pada daerah ini juga nyaris sama seperti yang berada pada wilayah Timur Antartika. Perbedaannya hanya pada jenis spesies-spesies biota tertentu seperti spesies pinguin yang berada pada wilayah Semenanjung Antartika berbeda dengan spesies yang berada pada wilayah Timur Antartika.

Pada wilayah ini juga terdapat stasiun-stasiun ilmiah yang didirikan oleh beberapa negara-negara seperti stasiun penelitian Rothera yang didirikan oleh Inggris (UK), stasiun penelitian Palmer (USA), stasiun penelitian Halley (UK), stasiun penelitian Esperanza (Argentina), stasiun penelitian King Edward Point (UK), dan stasiun penelitian Great Wall (China). Atas dibangunnya stasiun-stasiun penelitian tersebut, maka terlihat bahwa pemanfaatan wilayah ini dilakukan secara kolektif oleh beberapa negara. Meskipun demikian, pemanfaatan wilayah ini harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian Antartika, serta protokol-protokol yang mengatur negara-negara melakukan aktifitasnya di Antartika. Tetapi pada kenyataannya, terdapat negara yang melakukan tindakannya yang menyimpang dari perjanjian yang ada yang telah disepakati, seperti yang dilakukan oleh Inggris yang telah melakukan penegasan klaimnya serta pemberian penamaan pada sebagian wilayah ini, sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan atas negara lain yang juga melakukan klaimnya pada wilayah ini (<http://www.chinare.gov.cn/en/index.html?pid=stations&st=great wall>).

Meskipun ada penelitian yang berlangsung secara damai di antara negara-negara yang memanfaatkan wilayah ini, namun pada faktanya terjadi juga kompetisi dalam melakukan klaim pada wilayah ini. Negara-Negara yang melakukan klaim yaitu Argentina, Inggris, Perancis, Norwegia, Chili, Australia, dan Selandia Baru yang mana dari 7 negara tersebut masing-masing memiliki dasar klaimnya sendiri. (<http://www.antarctica.gov.au/law-and-treaty/history/antarctic-territorial-claims>).

Perjanjian Antartika (Antarctic Treaty)

Perjanjian Antartika dibuat atas inisiasi Amerika Serikat karena pada tahun 1940an muncul tanda-tanda persaingan antara Negara-Negara yang mengklaim wilayah di Semenanjung Antartika, yang selanjutnya berkembang menjadi konflik terbuka. Pada saat yang sama, beberapa negara takut bahwa kawasan tersebut akan menjadi pion dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang keduanya memiliki kepentingan di Antartika. Sehingga pada tahun 1959 Amerika Serikat menganjurkan untuk membuat semacam rezim internasional untuk Antartika yang kemudian menjadi sebuah Perjanjian Antartika. (<http://www.antarctica.gov.au/law-and-treaty/history>).

Perjanjian Antartika yang diinisiasikan oleh Amerika Serikat, akhirnya ditandatangani oleh dua belas negara pada tanggal 1 Desember 1959 di Washington. Selain dua belas negara penanda tangan asli, sesudahnya banyak negara yang ikut serta dalam Perjanjian Antartika, hingga kini jumlah keseluruhan negara yang ikut serta adalah 53 negara.

Perjanjian ini memberikan aturan bagi negara-negara melakukan aktivitasnya di Antartika, serta memperuntukkan wilayah ini digunakan dengan tujuan damai juga menetapkan sektor Antartika memiliki status quo, sebagaimana yang telah tercantum pada pasal IV yang berbunyi:

“Selama perjanjian ini berlaku, tidak boleh ada kegiatan yang merupakan penegasan, mendukung atau menolak sebuah klaim teritorial di Antartika atau membuat hak kedaulatan di Antartika. Tidak ada klaim baru atau perluasan klaim teritorial selama perjanjian ini berlaku.” (https://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf).

Klaim Inggris atas Wilayah Semenanjung Antartika pada Tahun 2007

Pada tahun 1908, Inggris melakukan klaim teritorial terhadap wilayah yang berada di Antartika, tepatnya pada kuardan 20°W-80°W *south of 60°S* atau pada wilayah Semenanjung Antartika. Klaim Inggris di wilayah tersebut didasarkan pada banyak penemuan yang dilakukan oleh penjelajah Inggris. Penemuan awal tanah di wilayah Antartika yaitu pada kepulauan Georgia Selatan diyakini ditemukan oleh seorang pedagang Inggris yaitu Anthony de la Roche pada tahun 1675.

Satu abad kemudian, pulau tersebut ditemukan oleh Kapten Inggris James Cook, yang pada bulan Januari 1775 mengklaimnya atas nama Raja George III. Pada bulan yang sama, Captain Cook juga menemukan Kepulauan South Sandwich. Hampir 45 tahun kemudian, pada tahun 1819, William Smith menemukan South Shetlands dan mengklaim kepulauan tersebut untuk Kerajaan Inggris. Pada awal 1832 Kapten John Biscoe mengelilingi benua tersebut dan mengunjungi kepulauan Palmer. Pada dekade berikutnya, pada tahun 1841-43, Sir James Clark Ross juga mengelilingi benua tersebut, memetakan sekitar 800 kilometer pesisir di sepanjang Victoria Land dan menemukan Pulau Ross, disamping itu juga menemukan tepi utara lapisan es Ross. Pada bulan Januari 1843, Sir Ross mendarat di pantai timur Semenanjung Palmer dan mengklaim Pulau Ross untuk Kerajaan Inggris (Peter J. Beck 1994).

Klaim yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 1908 tersebut merupakan klaim pertama yang dibuat oleh Inggris di Antartika, dan juga merupakan klaim pertama yang dibuat oleh suatu negara terhadap wilayah tersebut, yang kemudian diikuti beberapa negara membuat klaimnya di wilayah tersebut. Hingga pada awal 1940an Argentina dan Chili juga ikut membuat klaimnya, namun klaim teritorial yang dibuat oleh Argentina dan Chili tumpang tindih dengan klaim yang dibuat oleh Inggris, yang kemudian mengakibatkan ketegangan antara tiga negara tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2007 Inggris secara *defacto* mengutarakan klaimnya kembali yang *overlaps* dengan klaim yang dibuat oleh Argentina dan Chili, yang kemudian menimbulkan reaksi langsung dari Argentina dan Chili atas pernyataan tersebut. Reaksi dari dua negara tersebut yaitu dengan mengirimkan delegasinya masing-masing. Dari Chili diwakili oleh delapan warga negaranya sedangkan dari Argentina diwakili oleh dua anggota parlemennya yang selanjutnya bertemu di salah satu stasiun penelitian yang berada di Antartika. Kedua negara tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak mengakui dasar klaim Inggris tersebut. Justru mereka menyatakan dukungannya terhadap usaha pemerintah mereka mempertahankan hak atas landasan kontinental Antartika (<http://www.express.co.uk/news/world/88020/Countries-reject-UK-Antarctic-claim>).

Lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 2012 Inggris memberi penamaan terhadap sebagian dari wilayah Antartika yang berada di ujung selatan *Antarctic Peninsula* dengan nama *Queen Elizabeth Land*, klaim ini disampaikan oleh menteri luar negeri Inggris William Hague, pada saat kunjungan Ratu Elizabeth ke kabinetnya untuk pertama kalinya, dia mengatakan:

“Sebagai tanda terima kasih negara ini kepada Ratu atas layanannya, kami menamai bagian dari Wilayah Antartika Inggris untuk menghormatinya sebagai *Queen Elizabeth Land*.” (<https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/queen-elizabeth-II/9752856/Part-of-Antarctica-named-Queen-Elizabeth-Land-as-gift-for-Diamond-Jubilee.html>).

Perihal tersebut diatas kemudian mengakibatkan munculnya reaksi dari pemerintah Argentina berupa penolakan keras atas tindakan Inggris yang memberi penamaan terhadap wilayah tersebut. Karena menurut Argentina, wilayah tersebut merupakan bagian dari sektor Antartika Argentina. Sehingga duta besar Inggris untuk Argentina dipanggil guna menjelaskan kepada pejabat di Buenos Aires terkait penamaan wilayah tersebut (<http://www.bbc.com/news/uk-20822582>).

Klaim Inggris yang dilakukan pada tahun 2007 menimbulkan protes dari Argentina dan Chili yang juga mengklaim wilayah yang sama. Namun, Inggris tetap mengutarakan klaimnya berdasarkan kepentingan Inggris terhadap wilayah tersebut. Kepentingan Inggris ini dilihat dari perspektif geopolitik maritim, perspektif geopolitik *aerospace*, *continental*, dan perspektif geopolitik sumber daya.

1. Kepentingan Untuk Menguasai Wilayah Semenanjung Antartika

Kepentingan Inggris ini merupakan gabungan dari perspektif kepentingan yang dilihat dari perspektif geopolitik *maritime*, geopolitik *aerospace*, dan geopolitik *continental*. Secara umum, gabungan perspektif ini menjelaskan kepentingan pengendalian dari sisi lautnya (perairan), daratannya, serta udara. Dari sisi

pengendalian atas wilayah lautnya, terlihat Inggris ingin mengendalikan wilayah laut di perairan Antartika, dibuktikan dengan adanya patroli kapal angkatan laut Inggris HMS Protector yang berlayar di perairan tersebut sejak 2012 meskipun tidak selalu menetap di perairan tersebut.

HMS Protector merupakan kapal dengan jenis pemecah es dan memiliki sistem persenjataan yang digunakan selama 330 hari dalam satu tahun, digunakan sebagai kapal pemecah es (untuk patroli es). Kapal ini juga digunakan untuk melindungi ekosistem di Antartika. Selama patrolinya juga memeriksa sejumlah kapal penangkap ikan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perizinan di daerah tersebut. Selain itu, untuk memberikan kehadiran kedaulatan Inggris pada British Antarctic Territory, Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan serta daerah laut sekitarnya (<https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2016/january/18/150118-protector-worlds-end>).

Selain ingin mengendalikan atas wilayah laut, Inggris juga ingin memiliki wilayah tersebut, dibuktikan dengan adanya klaim serta penegasan klaim pada tahun 2007, juga pemberian penamaan terhadap sebagian wilayah yang tercakup di dalam klaimnya yang disebut sebagai British Antarctic Territory, Inggris juga menjadikan wilayah yang di klaimnya sebagai wilayah luar negeri Inggris (*British Overseas*) yang dikelola di London oleh staf di departemen wilayah kutub luar negeri dan kantor persemaikmuran, terkecuali pada South Georgia & South Sandwich Islands yang mana merupakan UK overseas territory yang dikelola oleh pemerintah Georgia Selatan dan pemerintah Kepulauan Sandwich Selatan (GSGSSI).

Keseriusan Inggris dalam hal pengendalian terhadap wilayah yang diklaimnya juga terlihat dalam mendanai strategi kerangka kerja lima tahun yang telah dibuatnya yang bertujuan untuk memastikan keamanan jangka panjang Territory yang diklaimnya, untuk mempromosikan kedaulatan Inggris di wilayah tersebut, untuk melindungi lingkungan BAT dan melestarikan warisan Inggris, untuk memastikan kerangka kerja legislatif dan administratif yang efektif dan proporsional yang menangani semua kegiatan yang dilakukan di dalam BAT, serta untuk mengelola keuangan Territory sesuai dengan praktik keuangan terbaiknya. Sebagaimana telah tercantum dalam dokumen British Antarctic Territory Strategy 2014-2019 yang memiliki 4 bidang prioritasnya yaitu:

- a) Perlindungan lingkungan dan meminimalkan dampak manusia
Pemerintah Inggris memiliki visi hingga tahun 2019 untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang lingkungan BAT; tantangan yang dihadapinya yaitu pengelolaan dengan kehati-hatian untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekosistem kutub yang rentan terhadap aktifitas manusia, serta metode untuk konservasinya yaitu dengan cara membuat pemetaan lingkungan juga memberikan saran kebijakan kepada Pemerintah tentang penggunaan sumber daya alam. Yang mana selama tiga puluh tahun para ilmuwan BAS telah berperan memberikan saran dan dukungan ilmiah dalam pengembangan prosedur manajemen berkelanjutan, melalui Perjanjian Antartika dan *Commission for the Conversation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR).

b) Pendidikan

Pemerintah Inggris memiliki visi hingga tahun 2019 memberi kesadaran publik yang lebih besar tentang masalah Antartika dan BAT serta peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya pendidikan yang tersedia yaitu dengan cara memberi insentif untuk pembentukan PEI (*Polar Educators International*).

c) Warisan

Pemerintah Inggris memiliki visi hingga tahun 2019 untuk memberikan kesadaran publik yang lebih besar terhadap warisan budaya Inggris yang kaya di Wilayah Antartika Inggris sebagai pengelolaan jangka panjang yang efektif dan berkelanjutan atas aset budaya Inggris.

d) Pemerintahan dan mempromosikan kedaulatan Inggris di Antartika

Pemerintah Inggris memiliki visi hingga tahun 2019 untuk membuat proses keuangan dan hukum yang lebih efisien, buku undang-undang yang dimodernisasi dan peningkatan pendapatan tahunan yang tepat dan berkelanjutan. (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/675241/British-Antarctic-Territory-Strategy-2014-2019.odt).

Selain pengendalian atas kontrol laut, pengendalian atas kontrol tanah dan kepulauan-kepulauan juga dilakukan Inggris terhadap wilayah yang diklaimnya. Terbukti atas dibangunnya sejumlah lima stasiun penelitian Inggris yang tiga di antaranya berdiri di kepulauan-kepulauan yang berada di dalam BAT. Selain itu, usaha yang dilakukan Inggris kaitannya dengan pengendalian dan penguasaan atas wilayah tanah yang diklaimnya yaitu dengan pemberian penamaan terhadap sebagian wilayah yang tercakup dalam klaimnya, meskipun hal tersebut mengakibatkan ketegangan atas negara lain yang juga melakukan klaim yang sama atas wilayah tersebut serta melanggar perjanjian yang ada pada wilayah itu.

Selain itu, dalam usahanya melakukan pengendalian atas wilayah udara, meskipun tidak melibatkan penggunaan pesawat tempur, namun Inggris telah membangun landasan pesawat cargo di stasiun penelitian Rothera, serta menggunakan pesawat cargonya guna mempermudah menjalankan serangkaian kegiatannya di wilayah tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya wilayah ini juga dapat digunakan untuk meletakkan alutsista khususnya pesawat tempur. (<https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/rothera/rothera-air-facility/>).

Dari pengendalian atas wilayah laut dan daratan, dimungkinkan Inggris akan mendapatkan penguasaan atas wilayah udara seluas wilayah yang di klaimnya. Seperti yang telah tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada pasal 2 yang berbunyi:

“Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.”

Keuntungan yang akan diperoleh atas penguasaan wilayah udara tersebut yaitu di antaranya adalah sebagai transportasi udara yang berguna untuk memudahkan

Inggris memasok logistik ke wilayah-wilayah yang berada dalam cakupan klaimnya tersebut. Selain itu, pengendalian atas wilayah udara, memungkinkan Inggris memiliki keamanan yang lebih atas wilayah kalimnya, karena mengharuskan pesawat negara lain yang melintasi wilayah udaranya memiliki izin melintas atau menggunakan wilayah udara tersebut, selain itu Inggris juga bisa memberikan pengawasan terhadap setiap pesawat yang melintas apakah merupakan ancaman atau tidak.

Di samping keuntungan atas penguasaan wilayah udara, penguasaan atas wilayah laut dan daratan juga memiliki keuntungan tersendiri, meskipun hampir sama saja yaitu sebagai jalur transportasi serta kontrol atas negara lain yang melintasi wilayah tersebut. Namun juga terdapat keuntungan lainnya seperti dengan penguasaan atas wilayah laut dan daratannya, dimungkinkan potensi-potensi sumber daya yang terkandung di dalam laut dan daratannya tersebut tidak tereksploitasi oleh negara lain.

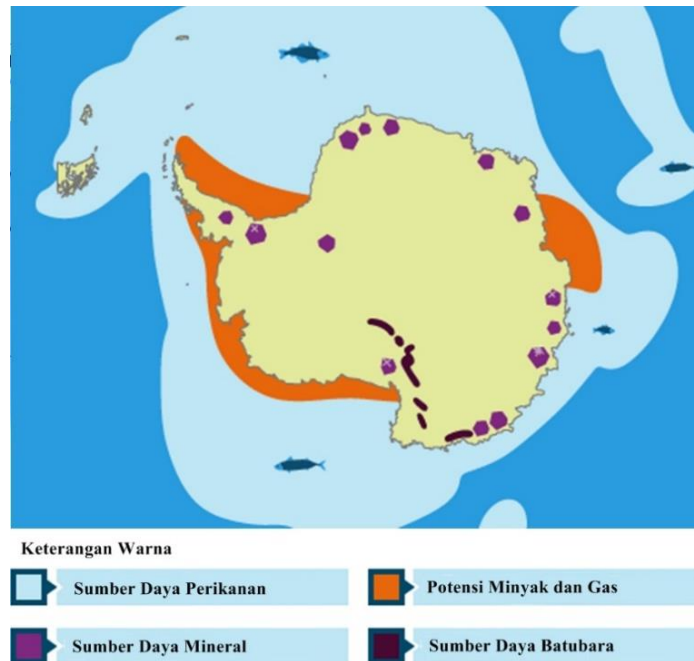
2. Kepentingan Untuk Menguasai Sumber Daya Alam dan Potensi Pariwisata

Kepentingan untuk menguasai sumber daya ini masuk dalam perspektif geopolitik sumber daya yang pandangannya berpusat pada kompetisi sumber daya minyak langka dan sumber energi lainnya serta mineral strategis. Klaim Inggris terhadap wilayah Semenanjung Antartika jika dilihat dari perspektif ini, klaimnya dilatarbelakangi oleh potensi yang ada pada wilayah tersebut.

Secara umum Antartika diyakini memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, seperti yang telah di sebutkan oleh CIA dan juga Green Peace bahwasanya wilayah ini memiliki kandungan minyak, bijih besi, kromium, tembaga, emas, nikel, batubara, hidrokarbon, dan mineral lainnya. Sedangkan menurut Ellie Fogarty dalam Lowy Institute mengklaim cadangan minyak di Antartika diperkirakan mencapai 203 miliar barel. Pada benua ini juga diperkirakan memiliki 70% cadangan air tawar dunia (https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/pubfiles/Fogarty%2C_Antarctica_web_1.pdf).

Dalam sumber-sumber lain seperti diuraikan oleh BBC yang memberikan pemetaan potensi sumber daya yang ada di Antartika seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Peta Pemetaan Potensi Sumber Daya di Antartika



Sumber: BBC | Potential Resources in Antarctica (<http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/geography/places/antarctica/revision/5>).

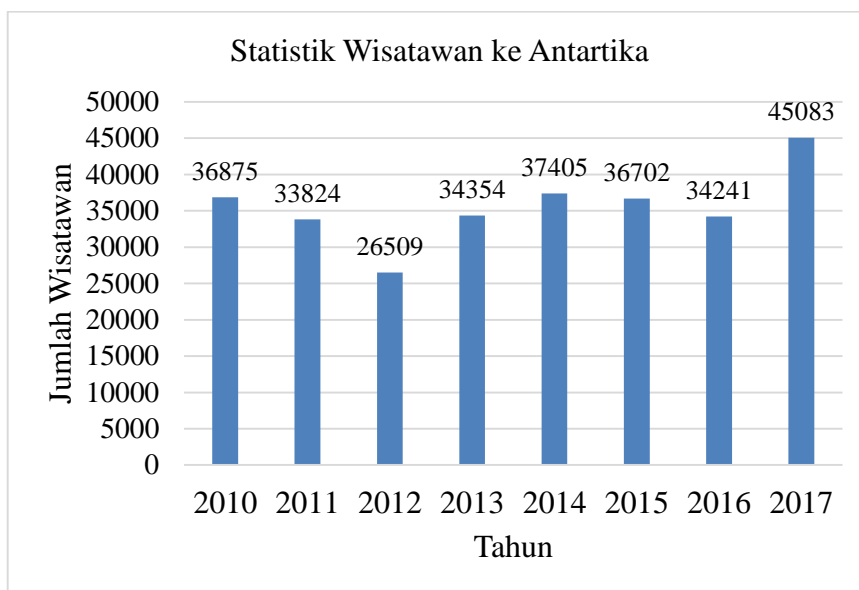
Dari gambar di atas, terlihat wilayah Antartika memiliki empat potensi sumber daya alamnya yaitu potensi sumber daya perikanan, sumber daya mineral, sumber daya batubara dan potensi minyak dan gas. Klaim yang dibuat oleh Inggris pada wilayah Semenanjung Antartika sekurangnya memiliki tiga dari empat potensi sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut yaitu perikanan, mineral serta potensi minyak dan gas.

Sumber daya perikanan yang terdapat pada wilayah tersebut yaitu terdapatnya ikan Paus Bungkuk, Krill, Patagonian, and Antarctic Toothfish yang tiga di antara biola laut tersebut memiliki harga pasar yang tinggi, yang disebabkan karena permintaan produk ikan yang tinggi oleh restoran-restoran berbintang di Amerika Utara, juga karena sulitnya serta biaya yang mahal untuk melakukan penangkapan ikan di Antartika.

Selain harga produk perikanannya yang tinggi, potensi perikanan pada wilayah ini juga cukup berlimpah. Dibuktikan dengan data yang dihimpun oleh CCAMLR (*Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*) yang menyebutkan bahwa terdapat penangkapan ikan di perairan Antartika sekitar 295.000 ton pada 2013-2014.

Selain itu, potensi sumber daya lainnya yang terdapat pada wilayah ini adalah potensi pariwisata yang cukup tinggi, walaupun jumlahnya fluktuatif pada setiap tahunnya. Dibuktikan dengan data yang dihimpun oleh IAATO (*International Association of Antarctica Tour Operators*) seperti yang tercantum pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1 Statistik Wisatawan ke Antartika



Sumber: *International Association of Antarctica Tour Operators* (<https://iaato.org/tourism-statistics>).

Dari grafik di atas terlihat bahwa kunjungan wisatawan ke Antartika sangat fluktuatif, meskipun demikian, jumlahnya cukup banyak jika ditotalkan dari tahun 2010-2017 yaitu berjumlah sekitar 284.993 wisatawan. Dari sejumlah wisatawan yang mengunjungi benua ini, sekitar 71% wisatawannya mengunjungi wilayah Semenanjung Antartika dengan menggunakan kapal berukuran kecil hingga ukuran sedang dengan kurang dari 501 penumpang. Kapal-kapal yang berkapasitas kurang dari 501 penumpang tersebut menawarkan kepada penumpangnya untuk berlabuh. Sedangkan para wisatawan yang menggunakan kapal-kapal besar atau bermuatan lebih dari 500 penumpang biasanya hanya melakukan pelayaran saja, karena jumlah maksimum wisatawan di darat dibatasi hingga 100 wisatawan saja. (<https://www.antarctic.eu/2014/05/07/new-statistics-for-tourism-in-antarctica.html>).

Selain menggunakan kapal, wisatawan juga bisa berwisata ke Antartika dengan menggunakan pesawat dari Bandar Udara Internasional *Presidente Carlos Ibáñez del Campo* (Chili) menuju Kutub Selatan, namun harus terlebih dahulu transit di *Union Glacier Camp*, atau melakukan pendaratan di *King George Island*. selain itu, beberapa maskapai penerbangan juga menawarkan perjalanan melintasi Antartika, namun tidak melakukan pendaratan di Antartika. (<http://swoop-patagonia-images.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/0x0x90/flying-to-antarctica-what-do-i-need-to-know-guide-72dpi.png>).

Dilihat dari tingginya intensitas kunjungn wisatawan ke wilayah Semenanjung Antartika tersebut, hal ini memberi nilai ekonomi tersendiri bagi Inggris. Karena dengan demikian Inggris mendapatkan *income* dari pajak dan penjualan prangko (*postage stamps*).

Selain itu, potensi lainnya pada wilayah Semenanjung Antartika yaitu dapat digunakan untuk basis militer, terlepas dari Perjanjian Antartika. Hal ini merujuk dari iklimnya yang lebih hangat dibandingkan dengan bagian wilayah lain di Antartika, Potensi lainnya pada wilayah Semenanjung Antartika yaitu dapat digunakan untuk basis militer, terlepas dari Perjanjian Antartika. Hal ini merujuk dari iklimnya yang lebih hangat dibandingkan dengan bagian wilayah lain di Antartika, serta merujuk dari keberhasilan Rusia membangun pangkalan militer Arctic Shamrock di Alexandra Land yang mana pada wilayah tersebut juga memiliki iklim yang ekstrim.

Disisi lain, meskipun iklimnya yang ekstrim, hal tersebut justru memberikan potensi lain pada wilayah ini. Diketahui bahwa wilayah ini berada di Kutub Selatan, sehingga pada musim panas selama sekitar enam bulan wilayah ini akan mendapatkan pencahayaan matahari selama 24 jam per harinya. Sehingga apabila dimanfaatkan dengan membangun sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti panel surya, hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi negara yang mengembangkannya. Begitupun dengan pembuatan pembangkit listrik tenaga angin berkat iklimnya yang ekstrim dan berangin pada wilayah ini.

Kesimpulan

Perjanjian Antartika yang telah diratifikasi oleh pemerintah Inggris dan telah berlaku sejak tahun 1961 memunculkan peraturan yang di antaranya menjadikan wilayah Antartika memiliki status quo. Tetapi, pada tahun 2007 Inggris justru melakukan klaim ulang terhadap sebagian wilayah Antartika yang pernah diklaimnya pada tahun 1908. Melihat dari perspektif geopolitik, tindakan yang dilakukan Inggris tersebut memiliki dua kepentingan yaitu kepentingan untuk menguasai wilayah dan kepentingan untuk menguasai sumber daya. Kepentingan menguasai wilayah dibuktikan dengan pemberian penamaan terhadap sebagian wilayah yang tercakup dalam klaimnya serta penetapan wilayah yang diklaim sebagai *British overseas*, juga beberapa upaya yang salah satunya mempromosikan bahwa wilayah tersebut merupakan kedaulatan Inggris di Antartika. Sementara kepentingan menguasai sumberdaya dibuktikan dengan terdapatnya potensi perikanan, serta potensi pariwisata yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu juga prediksi atas terdapatnya potensi sumber daya alamnya yang tidak dapat di perbaharui seperti minyak bumi yang notabenehnya masih menjadi prioritas bahan bakar kendaraan bermotor di abad ke-21. Dari kedua kepentingan tersebut, keduanya saling memiliki keterkaitan yang mana atas penguasaan wilayah, dimungkinkan Inggris juga akan menguasai atas sumber daya alamnya.

Daftar Pustaka

Buku

Beck, P.J. 1994. *Boundary and Territory Briefing Dalam Clive Schofield (Ed.), Who Owns Antarctica?: Governing and Managing the Last Continent*. UK: International Boundaries Research Unit Departement of Geography University of Durham.

CIA. 2016. *The CIA World Factbook 2017*. New York: Skyhorse Publishing, Inc.

Emmers, Ralf. 2009. *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia*. London: Routledge Publisher

Supangat, Agus. 2011. *Jalan-jalan ke Antartika – Kisah peneliti Indonesia pertama di Antartika*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Internet

Australian Antarctic Division. “*History of the Antarctic Treaty*”. Diperoleh 24 Maret 2018 dari <http://www.antarctica.gov.au/law-and-treaty/history>

Australian Antarctic Division. “*National claims to Antarctic Territory*”. Diperoleh 24 Maret 2018 dari http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/image/0004/35833/varieties/antarctic.png

BAS. “*Rothera Air Facility*”. Diperoleh 23 Maret 2018 dari <https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/rothera/rothera-air-facility/>

BBC News. 2012. “*Argentina angry after Antarctic territory named after Queen*”. Diperoleh 25 September 2017 dari <http://www.bbc.com/news/uk-20822582>

BBC News. “*Potential Resource in Antarctica*”. Diperoleh 12 Mei 2018 dari <http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/geography/places/antarctica/revision/5/>

BAS. “*The Antarctic Treaty (1959)*”. Diperoleh 23 September 2017 dari <https://www.bas.ac.uk/about/antarctica/the-antarctic-treaty/the-antarctic-treaty-1959/>

Cool Antarctica. “*Human Impacts on Antarctica and Threats to the Environment - Mining and Oil*”. Diperoleh 23 Maret 2018 dari https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/science/threats_mining_oil.php

Curtin, Rob. 2004. “*Resources in Antarctica: With the World’s dwindling natural resources, is there a chance for exploitation in Antarctica?*”. Diperoleh 26 Maret 2018 dari https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/14341/GCAS_6_Resources.pdf?sequence=1

Discovering Antarctica. “*Sizing up Antartika*”. Diperoleh 21 September 2017, dari http://discoveringantarctica.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/sizing_up_antarctica.doc

Express. 2009. “*Countries reject UK Antarctic claim*”. Diperoleh 23 September 2017 dari <http://www.express.co.uk/news/world/88020/Countries-reject-UK-Antarctic-claim>

- Greenpeace international. 1991. *“International Treaty saves the Antarctic from deadly threat”*. Diperoleh 20 Oktober 2017 dari <http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/Victories-timeline/Antarctic-Treaty/>
- IAATO. *“Tourism Statistics”*. Diperoleh 23 Maret 2018 dari <https://iaato.org/tourism-statistics>
- Lowy Institute. *“Antarctica: Assessing and Protecting Australia’s National Interests”*. Diperoleh 24 Maret 2018 dari https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/pubfiles/Fogarty%2C_Antarctica_web_1.pdf
- Menara Pengawal. *“Antartika”*. Diperoleh 26 Februari 2018 dari <https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/102000524>
- Secretariat of the Antarctic Treaty. *“The Antarctic Treaty”*. Diperoleh 23 September 2017 dari http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_e.pdf
- Shodhganga. *“a reservoir of Indian theses”*. Diperoleh 23 September 2017 dari http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18345/9/09_chapter%202.pdf
- Stange, Rolf. 2014. *“New statistics for tourism in Antarctica”*. Diperoleh 25 Maret 2018 dari <https://www.antarctic.eu/2014/05/07/new-statistics-for-tourism-in-antarctica.html>
- Tempo. 2017. *“Rusia Pamerkan Pangkalan Militer Terbaru di Antartika”*. Diperoleh 28 Maret 2018 dari <https://dunia.tempo.co/read/867385/rusia-pamerkan-pangkalan-militer-terbaru-di-antartika>